

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KETIMPANGAN EKONOMI DAERAH
PANTAI DI PULAU SUMATERA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh
Weni Softazia
15053023/2015

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KETIMPANGAN EKONOMI
DAERAH PANTAI DI PULAU SUMATERA

NAMA : WENI SOFTAZIA
NIM/BP : 15053023/2015
JURUSAN : PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI : EKONOMI KOPERASI
FAKULTAS : EKONOMI

Disetujui Oleh
Ketua Jurusan



Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd
NIP. 19820311 200501 2 005

Padang, Agustus 2019
Pembimbing



Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si
NIP. 19770525 200501 1 005

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi




Universitas Negeri Padang

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KETIMPANGAN EKONOMI DAERAH PANTAI
DI PULAU SUMATERA**

Nama : Weni Softazia
Bp/Nim : 2015/ 15053023
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Koperasi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

Nomor	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si	
2.	Anggota	Dr. Alpon Satrianto, SE, ME	
3.	Anggota	Menik Kurnia Siwi, S.Pd, M.Pd	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Weni Softazia
Nim/ Tahun Masuk : 15053023/ 2015
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk jaya, 29 September 1996
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Koto Baru, Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan
Judul/ Skripsi : Analisis Perbedaan Tingkat Ketimpangan Ekonomi Daerah Pantai di Pulau Sumatera

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik/ sarja baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis/skripsi ini adalah asli gagasan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing
3. Pada karya tulis/ skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini. Maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Desember 2019

Yang menyatakan



Weni Softazia
Nim.15053023

ABSTRAK

Weni Softazia 2015/15053023: **Analisis Perbedaan Tingkat Ketimpangan
Ekonomi Daerah Pantai di Pulau
Sumatera.**

Pembimbing: Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi di daerah pantai barat dengan daerah pantai timur dan daerah pantai utara dengan daerah pantai selatan di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan objek penelitian sebanyak 56 Kabupaten/Kota yang terdiri dari daerah pantai barat dengan sebanyak 23 kabupaten/kota yang berada di daerah pantai barat, sebanyak 23 kabupaten/kota yang berada di daerah pantai timur dan 20 kabupaten/kota yang berada di daerah pantai utara dan 20 kabupaten/kota yang berada di daerah pantai selatan pulau Sumatera selama pengamatan tahun (2013-2017). Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi adalah Indeks Williamson. Sedangkan untuk melihat adanya perbedaan ketimpangan ekonomi menggunakan metode statistik uji Paired Sample Test yang sebelum dilakukan uji ini dilakukan uji Normalitas kolmogrov-smirnov terlebih dahulu. Adapun dalam pengolahan data menggunakan SPSS versi 20 dan Microsoft Excel. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Daerah Pantai Barat dan Daerah Pantai Timur pada periode tahun 2013-2017 terdapat adanya perbedaan yang signifikan dimana tingkat ketimpangan ekonomi Kabupaten/Kota di daerah Pantai Barat Pulau Sumatera memiliki rata-rata ketimpangan 0.377315 lebih besar jika dibandingkan rata-rata ketimpangan ekonomi Daerah Pantai Timur Pulau Sumatera yaitu sebesar 0.28109. Sedangkan rata-rata tingkat ketimpangan ekonomi di daerah pantai utara yaitu sebesar 0,380389 lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah pantai selatan yaitu memiliki rata-rata ketimpangan sebesar 0,324990. Jadi setiap daerah Pantai di Pulau Sumatera memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang berbeda.

Kata Kunci: Ketimpangan Ekonomi

ABSTRACT

Weni Softazia 2015/15053023 : *Analysis of Differences in the Level of Economic Inequality in Coast Areas in Sumatra Island.*

Advisor: Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si

This research aims to analyze differences in the level of economic inequality in the west coast area and the east coast region and the north coast region with the south coast region on the island of Sumatra. This study uses secondary data using research objects as many as 56 regencies / cities consisting of the west coast area with as many as 23 regencies / cities located in the west coast area, as many as 23 regencies / cities in the east coast area and 20 regencies / cities that are located in the north coast and 20 regencies / cities in the south coast of Sumatra during the observation period of 2013-2017. The analytical technique used to analyze the level of economic inequality is the Williamson Index. Meanwhile, to see the differences in economic inequality using the statistical method of Paired Sample Test which before the test was carried out the Kolmogrov-Smirnov normality test first. As for data processing using SPSS version 20 and Microsoft Excel. Based on the Williamson Index calculation shows that the Regency / City of the West Coast Region and East Coast Region in the period 2013-2017 there is a significant difference where the level of economic inequality Regency / City in the West Coast region of Sumatra Island has an average inequality of 0.377315 greater if compared to the average economic inequality in the East Coast Region of Sumatra, which is 0.28109. While the average level of economic inequality in the north coast area is 0.380389 higher than the south coast area which has an average inequality of 0.324990. So each Coast region on the island of Sumatra has a different level of economic inequality

Keywords: *Economic Inequality Index*

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa sholawat beserta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh syafaatnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Perbedaan Tingkat Ketimpangan Ekonomi Daerah Pantai di Pulau Sumatera**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Pendidikan Ekonomi. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan hingga jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan skripsi ini penulis sangat membutuhkan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurna skripsi ini.

Ucapan terimakasih teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua, bapak Khairul Akmal dan Ibu Zarniati yang tidak pernah bosan memberikan do’a, dukungan moril, materil, motivasi, dan arahan demi kelancaran penulisan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kakak ku yang selalu memberikan semangat dan dukungan materil kepada penulis. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman spesial yang selalu menjadi pendengar setia, dan selalu memberikan semangat dan motivasi ketika penulis mangalami hambatan-hambatan ketika sedang menulis skripsi.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Indris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Ibu Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd selaku Sektretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Menik Kurnia Siwi, S.Pd, M.Pd selaku penguji I.
4. Bapak Dr. Alpon Satrianto, S.E, M.E selaku penguji II.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah. Swt.

Padang, Agustus 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	17
C. Pembatasan Masalah	17
D. Perumusan Masalah	18
E. Tujuan Masalah.....	18
F. Manfaat Penelitian	19

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori	20
1. Teori Ketimpangan Ekonomi	20
a. Pengertian Ketimpangan Ekonomi	20
b. Dimensi Ketimpangan Ekonomi	23
c. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah	24
d. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Ekonomi	25
e. Ukuran Ketimpangan Ekonomi	26
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi	30
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	30
b. Faktor-Faktor Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Setiap Negara	35
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	36
3. Teori Pembangunan Ekonomi	39
a. Pengertian Pembangunan Ekonomi	39
b. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah.....	42
c. Syarat-Syarat Pembangunan Ekonomi	43

B. Penelitian Relevan	44
C. Kerangka Konseptual.....	47
D. Hipotesis	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Objek Penelitian.....	49
C. Jenis Dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Defenisi Operasional.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52
1. Analisis Deskriptif.....	52
2. Analisis Inferensial.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Penelitian.....	55
1. Gambaran Umum Daerah Pantai Pulau Sumatera.....	55
2. Keadaan Penduduk	57
B. Hasil Penelitian	64
1. Deskripsi Data Penelitian	64
2. Rata-rata Hasil Perhitungan Indeks Williamson	65
a. Rata-Rata Hasil Perhitungan Indeks Williamson di Daerah Pantai Barat dan Daerah Pantai Timur Pulau Sumatera Selama Periode Penelitian 2013-2017.....	65
b. Rata-Rata Hasil Perhitungan Indeks Williamson di Daerah Pantai Utara dan Daerah Pantai Selatan Pulau Sumatera Selama Periode Penelitian 2013-2017.....	68
3. Analisis Inferensial.....	76
a. Uji Normalitas.....	66
b. Paired Sample T-test.....	79
C. Pengujian Hipotesis	81
D. Pembahasan	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Konstan Menurut Pulau-Pulau Di Indonesia Tahun 2013-2017 (Dalam Persen).....	5
Tabel 2. Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Barat di Sumatera Tahun 2013-2017 (Dalam Persen)	11
Tabel 3. Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Timur di Sumatera Tahun 2013-2017 (Dalam Persen).....	12
Tabel 4. Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Utara di Sumatera Tahun 2013-2017 (Dalam Persen).....	14
Tabel 5. Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Selatan di Sumatera Tahun 2013-2017 (Dalam Persen).....	15
Tabel 6. Jumlah Penduduk Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota Yang Berada Di Kabupaten/Kota Daerah Pantai Barat Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 (Jiwa).....	59
Tabel 7. Jumlah Penduduk Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota Yang Berada Di Kabupaten/Kota Daerah Pantai Timur Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 (Jiwa).....	60
Tabel 8. Jumlah Penduduk Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota Yang Berada Di Kabupaten/Kota Daerah Pantai Utara Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 (Jiwa).....	61
Tabel 9. Jumlah Penduduk Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota Yang Berada Di Kabupaten/Kota Daerah Pantai Selatan Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 (Jiwa).....	62
Tabel 10. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Barat dan Daerah Pantai Timur Pulau Sumatera	66
Tabel 11. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Utara dan Daerah Pantai Selatan Pulau Sumatera	69

Tabel 12. Hasil Uji Kolmogrov Smirnov Pada Indeks Ketimpangan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Barat Dan Pantai Timur Pulau Sumatera.....	77
Tabel 13. Hasil Uji Kolmogrov mirnov Pada Indeks Ketimpangan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Barat Dan Pantai Timur Pulau Sumatera.....	78
Tabel 14. Hasil Uji Paired Sample T-Test Pada Indeks Ketimpangan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Barat Dan Pantai Timur Pulau Sumatera.....	79
Tabel 15. Hasil Uji Paired Sample T-Test Pada Indeks Ketimpangan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Utara Dan Pantai Selatan Pulau Sumatera.....	80

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Foto Citra Satelit Nasa Pulau Sumatera Pada Malam Hari.....	8
Gambar 2. Kerangka Berpikir	48
Gambar 3. Peta Pulau Sumatera.....	56

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Rata-Rata Hasil Indeks Williamson Kab/Kota Daerah Pantai Barat	71
Grafik 2. Rata-Rata Hasil Indeks Williamson Kab/Kota Daerah Pantai Timur	72
Grafik 2. Rata-Rata Hasil Indeks Williamson Kab/Kota Daerah Pantai Utara	73
Grafik 2. Rata-Rata Hasil Indeks Williamson Kab/Kota Daerah Pantai Selatan	74

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peta Pulau Sumatera	105
Lampiran 2. Data PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota Daerah Pantai Barat dan pantai timur Pulau Sumatera Tahun 2013-2017	106
Lampiran 3. Data PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota Daerah Pantai Utara dan pantai selatan Pulau Sumatera Tahun 2013-2017	108
Lampiran 4. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Daerah Pantai Barat dan Daerah Pantai Timur Pulau Sumatera Tahun 2013-2017.....	109
Lampiran 5. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Daerah Pantai Utara dan Daerah Pantai Selatan Pulau Sumatera Tahun 2013-2017.....	110
Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov	111
Lampiran 7 Hasil Uji Paired Sampel T-Test	112

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang selalu menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di suatu Negara. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan antara suatu wilayah yang kaya dengan wilayah yang miskin, perbedaan ini dapat dilihat dari besarnya laju pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi dan infrastruktur disuatu daerah (Andrei, 2015).

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang dan selalu berupaya melakukan peningkatan dan perbaikan diberbagai sektor untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi yang lebih baik sehingga tercapai pembangunan yang baik pula dan dapat mengurangi masalah ketimpangan ekonomi disuatu Negara. Dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang baik itu pembangunan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembangunan nasional tetapi juga pembangunan untuk daerah-daerah agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi (Boediono, 2005).

Sejak tahun 2001 dilaksanakan otonomi daerah di Indonesia, kebijakan otonomi daerah dibawah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Kedua Undang-undang ini memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah

daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nehen,2010).

Sementara itu, di Indonesia sendiri walaupun terdapat tingkat pendapatan yang berbeda akan tetapi ketimpangan ekonomi di Indonesia tidaklah terlalu besar apabila dibandingkan dengan Negara lain yang mempunyai karakteristik yang sama (Hill, 1998). Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan pendapat Huther dan Shah (1998) mengamati dengan adanya sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah di Indonesia memperluas perbedaan antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin, *mismanagement macroekonomi* dan meningkatkan ketimpangan ekonomi.

Lindahman dan Thurmaier (2002) juga mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat menimbulkan ketidak stabilan makro ekonomi, ketimpangan ekonomi antar satu daerah dan lainnya. Hal ini disebabkan karena sistem desentralisasi fiskal ini terkadang hanya mementingkan kepentingan golongan atau kelompok serta digunakan untuk mengambil keuntungan pribadi, hal ini terjadi karena pemerintah pusat sulit untuk mengontrol pengelolaan perekonomian di daerah, karena semua wewenang untuk mengelola telah diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah itu sendiri, sehingga memicu perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi di masing-masing daerah di Indonesia.

Ketika tingkat ketimpangan ekonomi di Negara Indonesia tinggi, akan mempengaruhi tingkat ketimpangan di berbagai daerah yang ada di Indonesia, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber

daya manusia, dan perbedaan pembentukan modal serta adanya ketidakmerataan tingkat kemajuan teknologi dan industri di masing-masing daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tidak muncul di berbagai daerah dalam kurun waktu yang bersamaan karena pertumbuhan hanya akan terjadi di beberapa daerah yang disebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi yang berbeda.

Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah karena Alesina dan Rodric (dalam Patta, 2012) mengemukakan bahwa ketidak merataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu daerah pun akan mengalami penurunan dan akan menimbulkan ketimpangan ekonomi disuatu daerah.

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah disebabkan oleh Ketimpangan pembangunan ekonomi antar satu daerah dengan daerah lainnya yang cukup tinggi dan berdampak pada keseimbangan perputaran kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tambunan (2001), menyatakan kegiatan ekonomi terpusat pada suatu daerah secara langsung akan berdampak pada ketimpangan pendapatan masyarakat antar daerah, sehingga akan tercipta kondisi dimana daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi akan lebih maju dan mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya akan lebih sejahtera. Sementara, disisi lain daerah yang bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi hanya mampu memberikan pendapatan yang rendah sehingga kemakmuran masyarakat daerah tersebut relatif rendah dan akan membuat tingkat ketimpangan ekonomi akan

meningkat, hal ini dapat kita lihat pada daerah-daerah yang ada di Pulau Sumatera.

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang terdiri dari 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung, yang tidak terlepas dari yang namanya ketimpangan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik di setiap daerah yang memiliki pengaruh besar dalam menciptakan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Sehingga pertumbuhan ekonomi di setiap daerah itu berbeda, bukan hal yang asing lagi jika tingkat pembangunan di setiap daerah itu tidak merata. Ketidakmerataan ini mempengaruhi tingkat kemampuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal inilah yang menyebabkan adanya tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di setiap daerah tidaklah sama.

Menurut Denny (2015) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah. Dari laju pertumbuhan Produk regional domestik bruto (PDRB) suatu daerah kita dapat melihat besar kecilnya laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB adalah total output akhir barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian suatu Negara, dalam penduduk asli maupun penduduk asing (Todaro, 2011:2017).

PDRB juga merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, dimana ketika tingkat PDRB suatu daerah itu tinggi maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan hidup

masyarakat di daerah tersebut dan begitu sebaliknya. Berikut ini adalah tabel 1 Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan menurut Pulau yang ada di Indonesia pada tahun 2013-2017 :

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Menurut Pulau-Pulau Di Indonesia Tahun 2013-2017 (Dalam Persen)

No	Pulau	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persen)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sumatera	4,95	4,60	3,53	4,29	4,30
2	Jawa	6,01	5,57	5,48	5,60	5,61
3	Bali, Nusa Tenggara	5,95	3,90	10,42	5,92	3,73
4	Kalimantan	3,95	3,37	1,38	2,02	4,33
5	Sulawesi	7,69	6,87	8,19	7,43	6,99
6	Maluku dan Papua	7,71	4,54	6,28	7,40	4,89

(Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 2018)

Dari tabel 1 dapat dilihat secara keseluruhan rata-rata laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan di Indonesia pada tahun 2013-2017 di setiap pulau yang ada di Indonesia selalu mengalami fluktuasi. Salah satunya yaitu Pulau Sumatera yang memiliki laju PDRB yang rendah dibandingkan dengan pulau lainnya. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRBnya yaitu sebesar 4,95%, lalu turun di tahun 2014 menjadi 4,60%, pada tahun 2015 menurun lagi menjadi 3,53%, dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2016 menjadi 4,29%, dan ditahun 2017 menjadi 4,30%. Pertumbuhan PDRB yang berfluktuasi menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan di masing-masing daerah yang ada di Pulau Sumatera.

Ketimpangan ekonomi dapat diartikan sebagai perbedaan struktur ekonomi suatu daerah jika dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Dapat dilihat dari tabel 1 Pulau Sumatera merupakan salah satu dari 6 pulau yang ada di Indonesia

yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi bahkan cenderung menurun, walaupun penurunannya tidak terlalu signifikan, permasalahan ini sedikit banyaknya akan berdampak kepada tingkat ketimpangan ekonomi di masing-masing Provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 443.0065,8 km² dan merupakan pulau dengan perkembangan ekonomi yang pesat kedua setelah pulau Jawa. Kegiatan ekonomi yang cukup pesat di pulau ini didukung oleh potensi sumber daya alam wilayahnya yang melimpah serta lokasinya yang sangat strategis. Terletak di ujung barat wilayah kesatuan Indonesia yang berbatasan dengan Selat Malaka, selat Sunda, dan Samudera Hindia, Pulau Sumatera memiliki asset yang sangat baik sehingga menjadi gerbang utama Indonesia dibagian barat. Sumber daya alam yang terkandung didalamnya memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga pengembangannya sangat cocok untuk sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modalnya di pulau Sumatera.

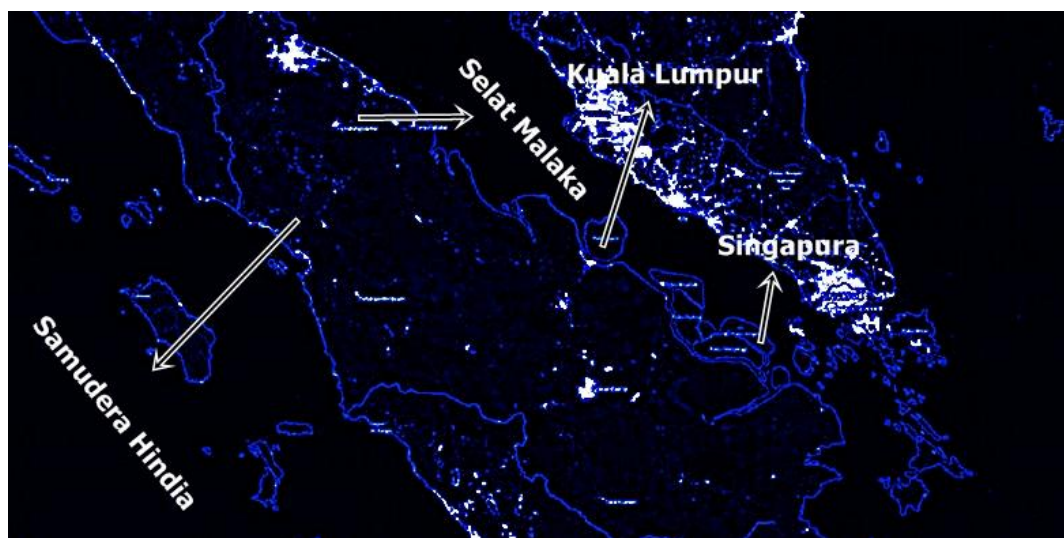
Dilihat dari segi geografis dan ekonomis daerah-daerah yang terletak di bagian pesisir Pantai Pulau Sumatera memiliki ketimpangan ekonomi yang berbeda pula. Daerah-daerah bagian Pesisir pantai barat dan bagian pesisir Pantai timur Pulau Sumatera merupakan daerah yang mempunyai peluang besar untuk maju di bandingkan dengan daerah-daerah yang terletak di bagian Pantai utara dan bagian Pantai selatan Pulau Sumatera, karena bisa kita lihat pulau Sumatera bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Samudera Hindia adalah jalur perdagangan yang cukup besar di Indonesia, yang akan mempermudah dan

memperluas jalur perdagangan daerah bagian Pantai Barat Sumatera untuk berdagang kesana. Sedangkan daerah Pantai Timur Pulau Sumatera berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan selat yang terletak antara Malaysia dan Pulau Sumatera, berdekatan juga dengan Singapura dan Selat Malaka ini merupakan Selat terpadat di dunia, karena di kawasan ini banyak terjadi kegiatan ekonomi. Begitu pula dengan daerah pantai selatan Pulau Sumatera berbatasan dengan Selat Sunda sedangkan daerah pantai utara di Sumatera berbatasan dengan Teluk Benggala yang secara langsung pasti keadaan perekonomian setiap daerah-daerah pesisir pantai ini berbeda dan ketimpangan ekonominya pun juga berbeda. berbatasan langsung dengan Negara-negara maju juga menjadi keuntungan bagi daerah pesisir pantai di Pulau Sumatera untuk mengembangkan perekonomian daerahnya.

Hal ini juga bisa dilihat dengan adanya sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Nasa Earth Observatory* pada tahun 2017 terhadap ketimpangan perekonomian yang dilihat melalui pancaran cahaya menggunakan Citra Satelit Nasa, dengan menggunakan alat pencitraan angkasa dan mengambil beberapa foto keadaan Pulau Sumatera pada malam hari. Dalam hal ini dilihat dengan ketentuan apabila ada pancaran cahaya yang terang pada suatu daerah di malam hari bisa dikatakan bahwa di daerah tersebut banyak terjadi kegiatan ekonomi, oleh sebab itu banyak cahaya di malam hari yang berasal dari tempat kegiatan ekonomi tersebut.

Tetapi jika di daerah itu gelap atau tidak ada terpancar cahaya sedikitpun bisa dikatakan bahwa hanya sedikit terjadi kegiatan ekonomi sehingga hanya sedikit pula cahaya yang terlihat bahkan ada daerah yang tidak mempunyai cahaya

atau gelap gulita di daerah tersebut. Ketika kegiatan ekonomi itu sedikit terjadi di suatu daerah diduga di daerah tersebut terdapat ketimpangan ekonomi di daerah tersebut tinggi dan begitu sebaliknya, apabila kegiatan ekonomi disuatu daerah itu banyak, maka bisa dikatakan bahwa tingkat ketimpangan ekonominya rendah (Alexander Lumbantobing, 2017). Berikut ini Gambar 1 adalah hasil foto keadaan Pulau Sumatera pada malam hari yang diambil oleh Citra Satelit *Nasa Earth Observatory* 2017 :



Gambar 1. Foto Citra Satelit Nasa Pulau Sumatera Pada Malam Hari.
<https://medan.tribunnews.com/amp/2017/04/20/nasa-rilis-foto-Indonesia-saat-malam-hari-kota-mana-saja-yang-terlihat-benderang?page=2>
 (Sumber dari data Nasa Earth Observatory 2017)

Dari gambar 1 dapat dilihat hasil foto dari Pulau Sumatera yang diambil pada malam hari oleh *Nasa Earth Observatory* pada tahun 2017, bahwa terdapat cahaya yang cukup terang di daerah Pantai Timur Pulau Sumatera sedangkan di daerah Pantai Barat pulau Sumatera hanya terdapat sedikit Nampak cahaya dan begitu pula dengan daerah bagian pantai utara dan pantai selatan Pulau Sumatera hanya sedikit Nampak cahaya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *Nasa Earth Observatory* pada tahun 2017, bahwa kita dapat melihat banyaknya

kegiatan ekonomi disuatu wilayah apabila di wilayah tersebut terdapat cahaya yang begitu terang, maka banyak terjadi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Dapat dilihat pada Negara Malaysia dan Singapura cahaya yang begitu terang yang menandakan bahwa banyak terjadi kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut dan juga di daerah-daerah Sumatera yang berada di bagian Pantai Timur yang berdekatan dengan Selat Malaka, Singapura, dan Malaysia juga memiliki beberapa titik cahaya yang cukup terang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *Nasa Earth Observatory* pada tahun 2017 terdapat cahaya yang begitu terang di daerah pantai timur dan cahaya yang redup dan sedikit di daerah pantai barat dan begitu juga di daerah yang terlatak dibagian daerah pantai utara dan pantai selatan di Pulau Sumatera yang menandakan adanya perbedaan banyaknya kegiatan ekonomi yang menyebabkan adanya perbedaan ketimpangan ekonomi di suatu daerah. Maka penulis ingin juga membuktikan dan melihat pada penelitian ini berapa besar perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi di daerah pantai barat dengan daerah pantai timur di Pulau Sumatera dan perbedaan ketimpangan ekonomi di daerah Pantai Utara dan daerah Pantai Selatan Pulau Sumatera. Perbedaan kegiatan ekonomi di masing-masing daerah tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi antara daerah Pantai di Pulau Sumatera.

Perbedaan dari kegiatan ekonomi masing-masing daerah akan menyebabkan tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi pada setiap daerah itu berbeda. hal ini mungkin disebabkan karena di setiap daerah memiliki keunggulan komperatif yang berbeda. Seperti perbedaan tersedianya sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan faktor produksi, dan perbedaan

infrastruktur penunjangnya serta kemampuan sumber daya manusia mengelolah sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan bagus. Dan juga kemampuan pemerintah daerah untuk menarik investor-investor untuk menanamkan sahamnya di daerah tersebut.

Jalur perlintasan yang dimiliki oleh daerah pantai timur Pulau Sumatera untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sangatlah bagus. Terletak berdekatan dengan Selat Malaka, Malaysia dan Singapura menjadi keuntungan sendiri bagi daerah pantai timur Pulau Sumatera dibandingkan dengan daerah pantai lainnya di Pulau Sumatera.

Perbedaan keunggulan komperatif dari setiap daerah yang berada di pesisir pantai Pulau Sumatera juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi melalui besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing Kabupaten/Kota yang berada di daerah pesisir Pantai Pulau Sumatera.

Ketika rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah itu tinggi maka dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga baik. Akan tetapi jika laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah itu rendah, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut bisa dikatakan rendah. Berikut ini adalah tabel 2 Rata-rata laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan menurut Kabupaten/Kota yang berada di daerah Pantai Barat dan daerah Pantai Timur Pulau Sumatera pada tahun 2013-2017 :

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Barat Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 (Dalam Persen)

No	Provinsi	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kab.Aceh Jaya	3,20	3,69	3,71	3,97	4,27	3,76
2	Kab. Aceh Barat	3,90	3,36	4,58	2,92	3,15	3,58
3	Kab. Aceh Selatan	5,32	4,51	4,23	4,64	3,93	4,52
4	Kab. Aceh Singkil	4,49	3,72	3,72	4,16	3,98	4,01
5	Pidie	4,24	4,03	4,82	3,91	4,39	4,27
6	Pidie Jaya	4,55	3,63	4,84	3,70	5,80	4,50
7	Nias	6,35	5,77	5,52	5,03	5,01	5,53
8	Nias Selatan	4,65	4,32	4,43	4,48	4,60	4,49
9	Tapanuli Tengah	5,18	5,04	5,08	5,12	5,24	5,13
10	Tapanuli Selatan	4,43	4,44	4,86	5,12	5,21	4,81
11	Tapanuli Utara	5,27	5,04	4,89	4,12	4,15	4,69
12	Gunung Sitoli	6,22	6,07	5,79	6,03	6,01	6,02
13	Mandailing Natal	6,37	6,49	6,21	6,18	6,09	6,26
14	Kota Sibolga	5,96	5,84	5,65	5,15	5,27	5,57
15	Kep. Mentawai	5,77	5,57	5,20	5,02	5,13	5,33
16	Kab. Pesisir selatan	5,90	5,80	5,73	5,33	5,42	5,63
17	Padang Pariaman	6,20	6,05	6,14	5,52	5,59	5,90
18	Kota Padang	6,66	6,46	6,41	6,22	6,23	6,39
19	Kota Pariaman	6,06	5,99	5,79	5,59	5,62	5,81
20	Pasaman Barat	6,40	6,04	5,70	5,33	5,35	5,74
21	Bengkulu Selatan	6,17	5,68	5,14	5,32	5,01	5,46
22	Kota Bengkulu	6,09	6,12	6,02	6,17	5,64	6,00
23	Lampung Barat	6,87	5,56	5,32	5,01	5,03	5,55
TOTAL		132,03	124,52	124,93	119,31	121,13	118,95

(Sumber : Badan Pusat statistik Provinsi-Provinsi di Sumatera 2018 dan diolah)

Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada Di Daerah Pantai Timur Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 (Dalam Persen)

Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Pantai Timur Di Pulau Sumatera							Rata-Rata
1	Langsa	4,57	4,24	4,40	4,52	4,47	4,44
2	Kota Sigli	5,35	5,56	5,89	5,78	5,98	5,72
3	Kab. Beriu	4,03	4,02	4,80	4,08	4,09	4,20
4	Rokan Hilir	4,50	4,81	4,85	4,85	4,98	4,79
5	Karimun	7,09	6,87	6,54	6,17	5,42	6,41
6	Tanjung Balai	5,94	5,78	5,57	5,76	5,51	5,71
7	Tebing Tinggi	6,01	5,45	5,90	5,11	5,14	5,52
8	Bengkalis	5,25	5,85	4,74	4,44	4,77	5,01
9	Kota Medan	5,36	6,07	5,74	6,27	5,81	5,85
10	Lhoksmawe	5,78	5,27	5,24	5,17	5,19	5,33
11	Kab. Bintan	6,08	6,35	5,16	5,94	5,01	5,70
12	Kab. Lingga	6,88	5,16	4,38	4,09	6,41	5,38
13	Kota Batam	7,18	7,16	6,87	5,43	6,19	6,56
14	Tanjung Pinang	7,78	5,28	5,70	5,05	6,64	6,09
15	Dumai	5,13	5,53	6,41	6,32	6,01	5,88
16	Kab. Bangka	5,30	4,81	4,54	4,63	5,04	4,86
17	Bangka Belitung	5,96	5,72	5,53	5,97	5,29	5,69
18	Bangka Barat	5,09	4,72	4,53	4,97	5,29	4,92
19	Bangka Tengah	4,56	4,75	4,89	4,90	4,91	4,80
20	Bangka Selatan	4,45	4,44	4,27	4,30	4,57	4,40
21	Kab. Belitung Timur	5,70	5,17	5,40	5,24	5,17	5,33
22	Lampung Timur	8,96	6,87	6,58	7,23	7,64	7,45
23	Kota Metro	6,09	6,12	6,02	6,17	5,64	6,00
TOTAL		133,04	126,00	123,99	122,39	125,17	126,04

(Sumber : Badan Pusat statistik Provinsi-Provinsi di Sumatera 2018 dan diolah)

Dapat dilihat pada tabel 2 yaitu, Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota yang ada di daerah Pantai Barat dan daerah Pantai Timur Sumatera selalu berfluktuasi dari tahun 2013 sampai 2017. Dilihat secara keseluruhan dari tabel diatas bahwa jumlah rata-rata PDRB Kabupaten/Kota yang berada di bagian Pantai Timur Pulau Sumatera lebih tinggi di dibandingkan dengan jumlah rata-rata PDRB kabupaten/Kota yang terletak dibagian Pantai Barat Pulau Sumatera. Hal ini mungkin disebabkan karena setiap daerah memiliki perbedaan potensi baik dari segi sumber daya manusianya, sumberdaya alam, kualitas teknologi dan industri serta letak geografis dari daerah tersebut juga menjadi salah satu pendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari tabel 3 dapat dilihat secara keseluruhan total rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota daerah Pantai Barat Pulau Sumatera pada tahun 2013-2017 yaitu sebesar 118.95%. Sedangkan di Kabupaten/Kota daerah Pantai Timur Pulau Sumatera juga mengalami pertumbuhan PDRB yang berfluktuasi total laju pertumbuhan PDRBnya yaitu sebesar 126.04%. Perbedaan dari total laju pertumbuhan PDRB dari daerah pantai barat dan daerah pantai timur Pulau Sumatera akan mempengaruhi tingkat ketimpangan dari masing-masing daerah.

Hal ini mungkin disebabkan karena adanya masalah seperti masih kurangnya tingkat investasi, infrastruktur yang masih kurang memadai serta faktor lainnya yang belum bekerja secara maksimal, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di daerah Pantai Barat Pulau Sumatera.

Selain itu kita dapat juga melihat pertumbuhan PDRB kabupaten/Kota yang terletak di bagian Pantai utara dan Pantai selatan Pulau Sumatera pada tahun 2013 – 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada di Daerah Pantai Utara Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 (Dalam Persen)

No	Provinsi	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Aceh Jaya	3,20	3,69	3,71	3,97	4,27	3,76
2	Aceh Barat	3,90	3,36	4,58	2,92	3,15	3,58
3	Aceh Selatan	5,32	4,51	4,23	4,64	3,93	4,52
4	Aceh Singkil	4,49	3,72	3,72	4,16	3,98	4,01
5	Pidie	4,24	4,03	4,82	3,91	4,39	4,27
6	Pidie Jaya	4,55	3,63	4,84	3,70	5,80	4,50
7	Sigli	5,35	5,56	5,89	5,78	5,98	5,72
8	Bireuen	4,03	4,02	4,80	4,08	4,09	4,20
9	Langsa	4,57	4,24	4,40	4,52	4,47	4,44
10	Lhoksmawe	5,78	5,27	5,24	5,17	5,19	5,33
11	Nias	6,35	5,77	5,52	5,03	5,01	5,53
12	Nias Selatan	4,65	4,32	4,43	4,48	4,60	4,49
13	Tapanuli Selatan	4,43	4,44	4,86	5,12	5,21	4,81
14	Tapanuli Utara	5,27	5,04	4,89	4,12	4,15	4,69
15	Gunung Sitoli	6,22	6,07	5,79	6,03	6,01	6,02
16	Mandailing Natal	6,37	6,49	6,21	6,18	6,09	6,26
17	Sibolga	5,96	5,84	5,65	5,15	5,27	5,57
18	Tebing Tinggi	6,01	5,45	5,90	5,11	5,14	5,52
19	Tanjung Balai	5,94	5,78	5,57	5,76	5,51	5,71
20	Medan	5,36	6,07	5,74	6,27	5,81	5,85
TOTAL		101,99	97,3	97,08	96,01	98,05	98,78

(Sumber : Badan Pusat statistik Provinsi-Provinsi di Sumatera 2018 dan diolah)

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Yang Berada di Daerah Pantai Selatan Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 (Dalam Persen)

Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Pantai Selatan di Pulau Sumatera							Rata-Rata
1	Ogan Komering ilir	6,36	5,07	4,81	4,70	4,86	5,16
2	Kab. Ogan Ilir	7,26	6,66	4,43	5,12	5,13	5,72
3	Bengkulu	6,09	6,12	6,02	6,17	5,64	6,00
4	Bengkulu Selatan	6,17	5,68	5,14	5,32	5,01	5,46
5	Seluma	5,74	5,30	4,31	5,02	5,01	5,07
6	Bengkulu Utara	5,51	5,47	5,07	5,01	5,00	5,21
7	Kaur	6,09	4,82	4,96	5,34	5,11	5,26
8	Bandar Lampung	6,77	7,05	6,33	6,43	6,28	6,57
9	Lampung Selatan	6,41	5,80	6,38	5,22	5,46	5,85
10	Lampung Timur	8,96	6,87	4,58	4,23	4,64	5,85
11	Lampung Barat	6,87	5,56	5,32	5,01	5,03	5,55
12	Metro	6,89	6,13	5,87	5,90	5,66	6,08
13	Pesisisir Barat	5,54	5,10	4,94	5,31	5,34	5,24
14	Bangka	5,30	4,81	4,54	4,63	5,04	4,86
15	Belitung	5,96	5,72	5,53	5,97	5,29	5,69
16	Bangka Barat	5,09	4,72	4,53	5,97	5,29	5,12
17	Bangka Tengah	4,56	4,75	4,89	4,90	4,91	4,80
18	Bangka Selatan	4,45	4,44	4,27	4,30	4,57	4,40
19	Belitung Timur	5,70	5,17	5,40	5,24	5,17	5,33
20	Pangkal Pinang	6,04	6,65	5,17	5,67	6,98	6,10
TOTAL		121,76	105,76	102,49	105,46	105,42	109,39

(Sumber : Badan Pusat statistik Provinsi-Provinsi di Sumatera 2018 dan diolah)

Dapat dilihat pada tabel 4 yaitu, rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota yang ada di daerah Pantai Utara dan daerah Pantai Selatan Pulau Sumatera selalu berfluktuasi dari tahun 2013 sampai 2017. Dilihat secara keseluruhan dari tabel 4 bahwa jumlah rata-rata PDRB Kabupaten/Kota yang

berada di bagian Pantai Utara Pulau Sumatera lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah rata-rata PDRB Kabupaten/Kota yang berada di Pantai Utara Pulau Sumatera pada tahun 2013 sampai 2017. Hal ini disebabkan karena setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda, kualitas industri yang berbeda, serta letak geografis masing-masing daerah yang berbeda pula.

Dari tabel 5 dapat dilihat secara keseluruhan jumlah rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota daerah Pantai Utara Pulau Sumatera pada tahun 2013 sampai 2017 adalah sebesar 98.78%. sedangkan di Kabupaten/Kota daerah Pantai Selatan Sumatera juga mengalami pertumbuhan PDRB yang berfluktuasi total laju pertumbuhan PDRBnya yaitu sebesar 109.39%. Perbedaan dari total laju pertumbuhan PDRB dari daerah Pantai Utara dan daerah Pantai Selatan Pulau Sumatera akan mempengaruhi tingkat ketimpangan dari masing-masing daerah.

Dapat kita simpulkan dari data pada tabel di atas adanya perbedaan laju pertumbuhan PDRB di setiap daerah Pantai di Pulau Sumatera. Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi di setiap daerah dan karena itulah sangat dibutuhkan peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, agar bisa menghadapi masalah ini. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota yang berada di daerah Pantai Pulau Sumatera akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, taraf hidup masyarakat dan tingkat pemerataan pendapatan masing-masing wilayah.

Dengan adanya masalah perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi di daerah Pantai Pulau Sumatera baik itu antara daerah pantai barat dengan daerah pantai timur Pulau Sumatera maupaun Perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi

antara daerah Pantai Utara dan daerah Pantai Selatan Pulau Sumatera, dilihat dari adanya perbedaan antara tingkat PDRB dan Jumlah Penduduk serta perbedaan potensi di masing-masing Kabupaten/Kota yang berada di daerah Pantai Pulau Sumatera, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian yang berjudul “*Analisis Perbedaan Tingkat Ketimpangan Ekonomi Daerah Pantai di Pulau Sumatera*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah ini diperlukan agar penelitian yang dilaksanakan memiliki ruang lingkup yang jelas terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi, yaitu :

1. Adanya Perbedaan pertumbuhan ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi di daerah pantai Pulau Sumatera dan mengalami perkembangan yang berfluktuasi bahkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya baik itu di Daerah Pantai Barat dan daerah Pantai Timur maupun pada daerah Pantai Utara dan Pantai Selatan yang berada di Pulau Sumatera sehingga diduga adanya perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi di masing-masing daerah Pantai di Pulau Sumatera.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Objek penelitian adalah 56 Kabupaten/Kota yaitu terdiri dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di kawasan Pantai Barat dan 23 Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera serta 20

Kabupaten/Kota yang berada dikawasan daerah Pantai Utara Pulau Sumatera dan 20 Kabupaten/Kota yang berada di Pantai Selatan Pulau Sumatera pada tahun Periode 2013 sampai 2017.

2. Penelitian ini tentang perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Pantai Barat dengan Kabupaten/Kota yang berada dikawasan Pantai Timur Pulau Sumatera. dan perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Pantai Utara dengan Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Pantai Selatan Pulau Sumatera.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah Perbedaan Indeks ketimpangan ekonomi antara daerah Pantai Barat dengan daerah Pantai Timur di pulau Sumatera ?
2. Adakah perbedaan indeks ketimpangan ekonomi di daerah Pantai Utara dan Pantai Selatan di Pulau Sumatera ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Menganalisis perbedaan indeks ketimpangan Ekonomi daerah Pantai Barat dengan daerah Pantai Timur di Pulau Sumatera.
2. Menganalisis perbedaan indeks ketimpangan ekonomi daerah Pantai Utara dengan daerah Pantai Selatan di Pulau Sumatera.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, ekonomi pembangunan, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ekonomi sumber daya manusia.
2. Berguna bagi pengambil kebijakan pemerintah, dan badan pusat statistik.
3. Berguna bagi peneliti untuk meneliti tentang perbedaan analisis ketimpangan ekonomi di daerah Pantai yang ada di Pulau Sumatera .
4. Sebagai bahan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota daerah Pantai Barat dan daerah Pantai Timur memiliki perbedaan yang mana laju PDRB daerah Pantai Timur lebih besar dari daerah Pantai Barat Pulau Sumatera. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB daerah Pantai selatan lebih tinggi di bandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB daerah Pantai Utara Pulau Sumatera. Dari hasil Perhitungan Indeks Williamson diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata ketimpangan ekonomi antar daerah Pantai Barat dan daerah Pantai Timur Pulau Sumatera selama periode 2013-2017 dan memiliki tingkat perbedaan yang signifikan yaitu hasil perhitungan indeks Williamson daerah Pantai Barat mencapai rata-rata ketimpangan 0,377315 lebih besar jika dibandingkan dengan hasil perhitungan Indeks Williamson daerah Pantai Timur Pulau Sumatera yaitu rata-rata sebesar 0,28109. Sedangkan tingkat perbedaan ketimpangan ekonomi dari hasil perhitungan Indeks Williamson juga di alami oleh daerah Pantai utara yaitu sebesar 0,380389 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil perhitungan Indeks Williamson daerah pantai selatan Pulau Sumatera yaitu sebesar 0,324490.

Perbedaan tingkat ketimpangan ekonomi antara daerah pantai barat dengan daerah pantai timur ini juga dibuktikan dengan hasil uji statistik yang signifikan yaitu dari hasil Uji Paired Sampel T-test yang mana nilai probabilitas sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan ketentuan uji paired sampel T-test maka terdapat perbedaan yang signifikan antara ketimpangan ekonomi daerah Pantai barat dan daerah pantai timur Pulau Sumatera. Dan perbedaan ketimpangan

ekonomi antar daerah pantai utara dengan pantai selatan juga di buktikan melalui hasil uji statistik yang signifikan yaitu hasil Uji Paired Sample T-test yang mana nilai probabilitasnya sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05, sesuai dengan ketentuan uji Paired T-test yang sudah ditetapkan maka terdapat perbedaan tingkat ketimpangan antar dua daerah pantai ini. Dalam mengatasi permasalahan lebarnya ketimpangan ekonomi, paradigma yang dibuat pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan antar daerah. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah provinsi di Indonesia khususnya Sumatera yaitu lebih meningkatkan pembangunan ekonomi dengan membangun lebih banyak lagi sektor produksi dan industri di daerah Pantai Barat dan daerah Pantai Timur adalah agar perencanaan pembangunan diprioritaskan pada daerah yang relative tertinggal untuk mengatasi Ketimpangan ekonomi, pengangguran, lapangan usaha yang sedikit, sumber daya manusia yang berkualitas, dan masih banyak lagi masalah perekonomian lainnya.

Untuk meningkatkan kemampuan daerah yang kurang berkembang, pemerintah provinsi di Indonesia dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengelolah potensi daerah yang ada. Dengan memberikan subsidi yang bersifat materi maupun non materi seperti mengirim tenaga ahli untuk memberikan penyuluhan, menjadikan masyarakat dapat mengelolah dengan baik potensi wilayah tanpa harus menunggu petunjuk Pemerintah daerah termasuk didalamnya adalah membangun Infrastruktur daerah.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan diberbagai sektor ekonomi seperti meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengelola sumber daya alam dengan baik di daerah Pantai Barat dan daerah pantai timur Pulau Sumatera dan selalu menjaga kestabilan ekonomi di daerah Pantai Timur Pulau Sumatera agar bisa meratakan ketimpangan ekonomi yang terjadi di daerah pantai timur Pulau Sumatera. dan selalu megupayakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan di daerah pantai barat Pulau Sumatera.
2. Pemerintah sebaiknya selalu melakukan perbaikan pembangunan ekonomi agar bisa membuat distribusi income semakin meningkat, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah pantai barat dan daerah pantaai timur sehingga bisa menarik investor-investor untuk menanam modal di Pulau Sumatera. Pemerintah hendaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan softskill maupun hardskill dalam meningkatkan pendidikan dan kemampuan teknologi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan ketimpangan ekonomi di daerah pantai Pulau Sumatera dengan objek penelitian yang lebih banyak lagi dan periode tahun yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.hal 11-20.
- Andrei, Ana dan Liliana Craciun. 2015. *Inequality And Economic Growth: Theoretical And Operational Approach. Journal Theoretical and Applied Economics*, Bucharest University of Economic Studies, Romania. Volume XXII (2015), No. 1(602), pp. 177-186.
- Barro, R&X. Sala-I Martin, 1995, *Economic growth*, McGraw Hill, Inc. New York
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013).
- Becker, G. S. (1992). *Human Capital : A Theoretical Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago : The University of Chicago Press
- Boushey, Heather dan Carter C. Price. 2014. How Are Economic Inequality and Growth Connected? A Review of Recent Research. *Bullietin Washington Center For Equitable Growth*. www.equitablegrowth.org.
- Chiper, J M. (2014). *The Proccess of economic Development*. New York : Routledge.
- Bendavid-Val, Avrom, 1991, *Regional and local economic Analysis forPractitioners*, 4th Edition, Praeger publisher, New York.
- Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: *Memantapkan Perekonomian nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan*.
- Blair, Jhon P, 1955, *Local Economic Development: Analysis and Practice*, sage Publication. USA
- Blau, Mark, 1947, *Education and the employment Problem in Developing Countries*, ILO, Geneva.Blair,
- Boediono.(2005).”*Teori Pertumbuhan Ekonomi*”. Yogyakarta: BPFE.Yogyakarta
- Boushey, Heather dan Carter C. Price. 2014. How Are Economic Inequality and Growth Connected? A Review of Recent Research. *Bullietin Washington Center For Equitable Growth*. www.equitablegrowth.org.